Laporan Kegiatan PPKPT Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma





HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN SATGAS PPKPT

Laporan Satgas PPKPT ini telah dibuat di setujui dan di Sahkan Pada Hari/ Tanggal : 21 September 2025 Tempat : Kampus ITB Swadharama

Menyetujui

Warek 1 Akademik dan Kemahasiaan

Jakarta

Ketua PPKPT ITBS

Teddy Rochendi.SE.,MM

Sugiyono.,MM

Mengesahkan

Rektor ITB Swadharma

Dr. H. Abdillah. S.E., M.Si., AWP.

Tim SATGAS Pencegahan Penanganan Kekerasan Perguruan Tinggi ITB Swadharma :

Ketua Satgas : Sugiyono.,MM

Sekretaris : Eka Sudiarti.S.Kom

Anggota : Harun Ar Rasid.S.Kom.,M.Kom

: Latifah Rahman

: Ananda Puri

: Nuril Haspio Lesari

: Rhanthy Noferina

: Alya Marwah Nabila Putri

: Alief Al Caesar

: Alfa Herlmbang



KATA PENGANTAR

Bismillahirahmanirrahim

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kami kemudahan sehingga kami dapat menyelesaikan laporan Satgas PPKPT ini. Penyusunan laporani ini sebagai bentuk pertanggungjawaban Ketua Satgas PPKT dalam menjalan kan tugas selama periode September 2025 s/d Maret 2026

ITBS berkomitmen untuk menciptakan lingkungan kampus yang bebas dari perundungan dan kekerasan seksual.

Kelancaran Program Kegiatan Satgas PPKP tidak luput dari bantuan dan partisipasi dari seluruh civitas akademik, unsur pimpinan, dosen, karyawan, mahasiswa serta Para Satgas PPKPT ITBS. Untuk itu kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi. Semoga ITBS senantiasa terbebas dari kasus kekerasan seksual serta perundungan.

Kami menyadari bahwa kinerja serta laporan ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu kami mengharapkan sumbangan saran dan kritikan untuk perbaikan selanjutnya.

Terimakasih

Jakarta, 29 September 2025

Ketua Satgas PPKPT ITB

BAB I PENDAHULUAN

Kekerasan dalam berbagai manifestasinya, termasuk kekerasan seksual, merupakan permasalahan sosial yang serius dan memerlukan penanganan secara sistematis dan berkelanjutan. Tindakan kekerasan tidak hanya berdampak pada aspek fisik dan psikologis korban, tetapi juga berpotensi menghambat kemampuan individu untuk mengembangkan potensi diri secara optimal. Dalam konteks perguruan tinggi—sebagai ruang akademik tempat berlangsungnya proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat—terjaminnya rasa aman dan nyaman merupakan prasyarat mendasar bagi terciptanya lingkungan belajar yang kondusif.

Selaras dengan nilai-nilai dasar perguruan tinggi yang menjunjung tinggi integritas, inklusivitas, dan penghormatan terhadap martabat manusia, segala bentuk kekerasan, khususnya kekerasan seksual, harus menjadi perhatian kolektif seluruh elemen civitas akademika. Upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan kampus tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus dirancang dan diimplementasikan secara terpadu, komprehensif, serta berlandaskan pada prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia. Dengan demikian, perguruan tinggi dapat berperan aktif dalam menciptakan ekosistem pendidikan yang bebas dari kekerasan dan mendukung perkembangan potensi individu secara holistik.

Urgensi penanganan dan pencegahan kekerasan seksual semakin mengemuka apabila merujuk pada tingginya angka kasus yang masih terjadi di masyarakat. Fenomena ini mencerminkan belum optimalnya kesadaran kolektif serta sistem perlindungan yang tersedia bagi korban. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran publik mengenai isu kekerasan seksual menjadi salah satu langkah strategis dalam upaya menurunkan prevalensi kasus serupa. Melalui edukasi, kampanye sosial, serta pembentukan regulasi yang berpihak kepada korban, diharapkan tercipta lingkungan sosial yang lebih responsif dan protektif terhadap isu kekerasan seksual, sekaligus memberikan ruang pemulihan yang layak bagi para penyintas.

Dalam konsep di perguruan tinggi, kekerasan seksual dapat terjadi dalam hubungan sejawat maupun hierarkis antara pegawai ITBS (dosen, guru, tenaga kependidikan), mahasiswa, siswa dan juga masyarakat umum yang sedang memanfaatkan fasilitas kampus. Meskipun demikian, perlu diingat bahwa, sama seperti tindak kekerasan yang lain, kekerasan seksual rentan terjadi pada mereka yang menduduki posisi lebih lemah dalam struktur relasi kuasa.

Selain itu, kekerasan seksual juga sangat mungkin terjadi di dalam hubungan pacaran yang terjadi di kampus. Kekerasan dalam pacaran adalah tindak kekerasan atau ancaman tindak kekerasan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, dan/atau psikologis pada Korban, yang dilakukan oleh seseorang di luar lingkup rumah tangga yag sedang atau pernah menjalin hubungan romantik dan/atau seksual dengan Korban yang sering terjadi pula di lingkungan perguruan tinggi. Kekerasan dalam relasi pacaran biasanya terjadi karena pelaku merasa menjadi pemilik atas tubuh Pelapor sehingga berhak untuk melakukan apapun, termasuk memperoleh kepuasan seksual melalui pemerkosaan atau kekerasan seksual lainnya.

Tujuan

- 1. Sebagai bukti akuntabilitas kinerja Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Peruruan Tinggi (Satgas PPKPT) dalam melaksanakan upaya sistematis pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual di lingkungan institusi pendidikan tinggi.
- 2. Mewujudkan mekanisme yang terstruktur, adil, transparan, tegas, serta non-diskriminatif dalam proses pencegahan, pelaporan, dan penanganan kekerasan seksual yang menimpa civitas akademika, tenaga kependidikan, maupun masyarakat umum di lingkungan kampus.
- 3. Menyediakan perlindungan hukum, pendampingan psikososial, serta upaya pemulihan yang komprehensif bagi korban dan/atau pelapor kekerasan seksual, guna menjamin terpenuhinya hak-hak mereka dan mencegah reviktimisasi dalam proses penanganan.

Sasaran

Seluruh civitas akademika Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma (ITBS), termasuk mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, serta pihak lain yang berada di lingkungan kampus.

BAB II PERSIAPAN

Persiapan Pelaksanaan Pencegahan Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus ITBS

Dalam rangka mendukung implementasi upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma (ITBS), diperlukan sejumlah langkah strategis yang mencakup aspek administratif, perencanaan kegiatan, serta partisipasi aktif dalam jaringan kelembagaan yang relevan. Adapun beberapa bentuk persiapan yang telah dan akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- 1. Pengajuan Surat Keputusan (SK) Penetapan Tim Satgas PPKPT ITBS, sebagai dasar legalitas pembentukan dan operasionalisasi satuan tugas di tingkat institusi.
- 2. Penyusunan Pedoman Kerja Satgas PPKPT ITBS, yang berfungsi sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas, wewenang, dan tanggung jawab Satgas sesuai dengan regulasi yang berlaku.
- 3. Pengajuan SK Pengesahan Pedoman PPKPT, guna memperkuat posisi pedoman sebagai dokumen resmi institusi.
- 4. Perencanaan program kerja Satgas PPKPT melalui penyusunan proposal kegiatan yang memuat tujuan, ruang lingkup, metode pelaksanaan, serta evaluasi kegiatan.
- 5. Pembuatan desain materi kampanye dalam bentuk spanduk dan banner yang memuat informasi terkait PPKPT di lingkungan ITBS, sebagai bagian dari strategi sosialisasi dan edukasi.
- Penyusunan proposal kegiatan penguatan kapasitas Satgas PPKPT, yang mencakup pelatihan, workshop, serta kegiatan pendukung lainnya untuk meningkatkan efektivitas kerja Satgas.
- 7. Keterlibatan aktif dalam forum dan kegiatan Satgas PPKPT di wilayah LLDikti Wilayah III, sebagai bentuk kolaborasi antarperguruan tinggi dan penguatan jaringan kelembagaan.
- 8. Partisipasi dalam komunitas Ketua Satgas PPKPT perguruan tinggi di bawah koordinasi LLDikti Wilayah III, sebagai upaya berbagi praktik baik, bertukar pengalaman, serta memperluas wawasan terkait isu kekerasan seksual di lingkungan pendidikan tinggi.

BAB III. PELAKSANAAN KEGIATAN

Persiapan Pelaksanaan Pencegahan Kekerasan di Lingkungan Kampus ITBS

Dalam rangka mendukung implementasi upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma (ITBS), diperlukan sejumlah langkah strategis yang mencakup aspek administratif, perencanaan kegiatan, serta partisipasi aktif dalam jaringan kelembagaan yang relevan. Adapun beberapa bentuk persiapan yang telah dan akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- 1. Pengajuan Surat Keputusan (SK) Penetapan Tim Satgas PPKPT ITBS, sebagai dasar legalitas pembentukan dan operasionalisasi satuan tugas di tingkat institusi.
- 2. Penyusunan Pedoman Kerja Satgas PPKPT ITBS, yang berfungsi sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas, wewenang, dan tanggung jawab Satgas sesuai dengan regulasi yang berlaku.
- 3. Pengajuan SK Pengesahan Pedoman PPKPT, guna memperkuat posisi pedoman sebagai dokumen resmi institusi.
- 4. Perencanaan program kerja Satgas PPKPT melalui penyusunan proposal kegiatan yang memuat tujuan, ruang lingkup, metode pelaksanaan, serta evaluasi kegiatan.
- 5. Pembuatan desain materi kampanye dalam bentuk spanduk dan banner yang memuat informasi terkait PPKPT di lingkungan ITBS, sebagai bagian dari strategi sosialisasi dan edukasi.
- 6. Penyusunan proposal kegiatan penguatan kapasitas Satgas PPKPT, yang mencakup pelatihan, workshop, serta kegiatan pendukung lainnya untuk meningkatkan efektivitas kerja Satgas.
- 7. Keterlibatan aktif dalam forum dan kegiatan Satgas PPKPT di wilayah LLDikti Wilayah III, sebagai bentuk kolaborasi antarperguruan tinggi dan penguatan jaringan kelembagaan.
- 8. Partisipasi dalam komunitas Ketua Satgas PPKPT perguruan tinggi di bawah koordinasi LLDikti Wilayah III, sebagai upaya berbagi praktik baik, bertukar pengalaman, serta memperluas wawasan terkait isu kekerasan seksual di lingkungan pendidikan tinggi.

IV. KENDALA DAN HAMBATAN

Kendala dan Hambatan

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKPT) di lingkungan Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma (ITBS), terdapat sejumlah kendala dan hambatan yang masih dihadapi, antara lain:

- 1. Keterbatasan Anggaran Khusus untuk Kegiatan Satgas PPKPT Saat ini, kegiatan operasional Satgas PPKPT belum didukung oleh alokasi anggaran yang bersifat khusus dan terpisah. Pendanaan masih tergabung dalam pos anggaran kegiatan kemahasiswaan, yang berdampak pada keterbatasan ruang gerak dan fleksibilitas dalam perencanaan serta pelaksanaan program-program yang bersifat preventif maupun kuratif.
- 2. Belum Tersedianya Media Edukasi Khusus berupa Video Pencegahan Kekerasan Seksual Sampai saat ini, institusi belum memiliki konten audiovisual yang dirancang secara khusus untuk tujuan edukasi dan kampanye pencegahan kekerasan seksual. Padahal, media visual seperti video memilik

VI. RENCANA TINDAK LANJUT

Upaya Tindak Lanjut

Sebagai respons terhadap kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program Satgas PPKPT, telah dirumuskan beberapa langkah strategis guna meningkatkan efektivitas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan kampus ITBS, antara lain:

 Pengajuan Anggaran Khusus untuk Satgas PPKPT.
Satgas PPKPT akan mengusulkan alokasi anggaran khusus kepada pihak institusi sebagai bentuk komitmen terhadap pemenuhan hak dan perlindungan seluruh warga kampus.
Anggaran ini dirancang untuk mendukung pelaksanaan kegiatan preventif, promotif, serta

- responsif terhadap kasus kekerasan seksual, termasuk pelatihan, kampanye, pendampingan korban, dan kegiatan edukatif lainnya.
- 2. Penyelenggaraan Lomba Video Edukasi Bertema Kekerasan Seksual Dalam rangka meningkatkan kesadaran dan pemahaman civitas akademika mengenai berbagai bentuk kekerasan seksual, Satgas PPKPT akan menyelenggarakan lomba video pendek yang bertemakan

Lampiran

Kegiatan Sosialisasi PPKPT pada acara PPKMB ITBS















